

**PENERAPAN ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM PERJANJIAN
PINJAM MEMINJAM PADA KOPERASI SIMPAN PINJAM (KSP)**

ARTHA JAYA MAKMUR SURAKARTA

NASKAH PUBLIKASI



Oleh :

**FERRI HANDOKO
NIM :C100080118**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

2015

HALAMAN PENGESAHAN

Naskah Publikasi ini telah diterima dan disahkan oleh
Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada

Hari : Senin

Tanggal : 10 Agustus 2015

Pembimbing I



(Kelik Wardiono, S.H., M.H)

Pembimbing II



(Inayah, S.H., M.H)



Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta



(Dr. Natangsa Surbakti, S.H., M.Hum)

ABSTRAK

Asas kebebasan berkontrak adalah adanya kebebasan seluas-luasnya yang oleh Undang-Undang diberikan kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian. Asas kebebasan berkontrak merupakan asas yang esensial, baik bagi individu dalam mengembangkan diri baik di dalam kehidupan pribadi maupun kehidupan sosial kemasyarakatan. Dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan hukum yuridis normatif jenis penelitiannya deskriptif. Kesimpulan penelitian menjelaskan: (1) Unsur perjanjian pinjaman meminjam pada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Artha Jaya Makmur Surakarta: (a) Kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian dan (b) Kebebasan untuk menerima atau menyimpangi ketentuan Undang-Undang yang bersifat opsional menetapkan isi perjanjian sudah terpenuhi sesuai Pasal 1337, terdapat perlindungan (Pasal 1320 dan Pasal 18 ayat (1)). (2) Unsur-unsur: (c) Kebebasan untuk memilih dengan siapa akan membuat perjanjian, (d) Kebebasan untuk memilih dengan siapa akan membuat perjanjian, dan (e) Kebebasan untuk menentukan bentuk suatu perjanjian tidak terpenuhi (Pasal 1320 KUH Perdata), sehingga tidak terdapat perlindungan (KUHPerdata dan Pasal 18 Ayat (1) Huruf g dan huruf h).

Kata Kunci: Asas Kebebasan Berkontrak, Perjanjian Pinjam Meminjam, Koperasi

ABSTRACT

Freedom of contract principle is a wide freedom provided by law to people in making any agreement. The freedom of contract principle is as essential one for individual in developing himself/herself both in private life or social life. The research is descriptive with a juridical-normative legal approach. Conclusion of the research explains that: (1) element of loan agreement of Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Artha Jaya Makmur of Surakarta: (a) freedom of making or not making an agreement, and (b) a freedom of receiving or rejecting optional provisions of the law. Content of agreement was in line with Article 1337; protection was found (Article 1320 and Article 18 Paragraph (1)); (2) Elements: (c) a freedom of choosing people with whom an agreement will be made, (d) a freedom of choosing a form of agreement was not met (Article 1320 of Civil Law), so that there was no protection (Civil Law and Article 18 Paragraph (1) Letter g and Letter h).

Key words: Freedom of contract principle, loan agreement, cooperative.

PENDAHULUAN

Kondisi politik dan perekonomian yang tidak menentu menyebabkan banyak perusahaan yang mengalami kelesuan produksi. Salah satu cara untuk mengatasi krisis ekonomi yang berkepanjangan tersebut yaitu dengan memperkuat perekonomian nasional. Hal itu dapat ditempuh dengan mengembangkan sektor usaha swasta baik sektor usaha formal maupun sektor usaha informal. Termasuk didalamnya adalah sektor koperasi. Koperasi perlu mendapat perhatian yang cukup dari pemerintah baik waktu sekarang maupun waktu mendatang.

Koperasi sebagaimana diketahui adalah salah satu sektor ekonomi yang kehadirannya diakui oleh Undang-Undang Dasar 1945. Selain sektor koperasi, dua sektor lainnya adalah sektor swasta dan sektor ekonomi negara. Sampai saat ini, meskipun koperasi telah berkembang pesat akan tetapi peranannya secara keseluruhan dalam perekonomian masih kecil. Tidak dapat dipungkiri, bahwa diantara sektor pemerintahan, sektor swasta, dan sektor koperasi, bahwa sektor koperasilah yang berada dalam barisan yang terbelakang. Upaya mewujudkan koperasi sebagai soko guru ekonomi bangsa yang merupakan cita-cita nasional tampak dari adanya perkembangan informasi peran koperasi dalam peraturan ekonomi nasional.¹

Perjanjian baku menggunakan asas-asas hukum perjanjian yang di atur dalam Pasal 1338 KUHPdata ada tiga (3) yaitu:²

¹ Muhammad Firdaus dan Agus Edhi Susanto, 2002, *Perkoperasian, Sejarah, Teori, dan Praktek*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hal. 6.

² Hasanudin Rahman, 1998, *Aspek-aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hal. 37.

1. *Asas Konsensualisme; bahwa, perjanjian yang di buat umumnya bukan secara formal tetapi konsensual, artinya perjanjian itu selesai karena persetujuan kehendak atau konsensus semata-mata.*
2. *Asas Kekuatan Mengikatnya Perjanjian, bahwa, pihak-pihak harus memenuhi apa yang telah dijanjikan, sesuai dengan Pasal 1338 KUHPerdara, bahwa perjanjian berlaku sebagai Undang-Undang bagi para pihak.*
3. *Asas Kebebasan Berkontrak, bahwa orang bebas, membuat atau tidak membuat perjanjian, bebas menentukan isi, berlakunya dan syarat-syarat perjanjian, dengan bentuk tertentu atau tidak dan bebas memilih Undang-Undang mana yang akan di pakai untuk perjanjian itu.*³

Kebebasan kontrak adalah asas yang esensial, baik bagi individu dalam mengembangkan diri baik di dalam kehidupan pribadi maupun kehidupan sosial kemasyarakatan, sehingga beberapa pakar menegaskan kebebasan kontrak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang harus di hormati. Asas kebebasan kontrak bukan berarti menghalalkan bagi para pihak untuk mengingkari kontrak yang telah terlebih dahulu terjadi, maksudnya adalah para pihak dapat bebas mengadakan kontrak berdasarkan yang diperlukan.⁴

Asas keseimbangan sebagaimana tersirat dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mencerminkan asas keseimbangan dapat ditemukan pada Pasal 1320 ayat (1). Menurut Subekti, klausul sepakat dimaksudkan bahwa kedua subyek yang menyatakan perjanjian itu harus bersepakat, setuju atau seia-sekata mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang diadakan oleh para pihak. Maka dapat disimpulkan dalam Pasal 1320 ayat (1) tersebut secara tidak langsung

³ Ahmadi Miru, 2007, *Hukum Kontrak (Perancangan Kontrak)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hal. 1

⁴ Sjahdeini Sutan Remy, 1993, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia (Buku I)*. Jakarta: Institut Bankir Indonesia, hal. 80.

menghendaki dalam suatu hubungan yang dibuat oleh para pihak terdapat keseimbangan kehendak.⁵

Kebebasan berkontrak diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdara menjelaskan bahwa kebebasan berkontrak adalah asas yang esensial, baik bagi individu dalam mengembangkan diri baik di dalam kehidupan pribadi maupun kehidupan sosial kemasyarakatan, sehingga beberapa pakar menegaskan kebebasan berkontrak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dihormati.

Unsur-unsur asas kebebasan berkontrak, antara lain: a) Kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, b) Kebebasan untuk memilih dengan siapa akan membuat perjanjian, c) Kebebasan untuk menetapkan bentuk perjanjian, d) Kebebasan untuk menetapkan isi perjanjian, dan e) Kebebasan untuk menetapkan cara membuat perjanjian.⁶

Perjanjian pinjaman di dalam praktek merupakan perjanjian baku. Asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian pinjaman terdapat pada isi perjanjian. Pada saat koperasi telah mengambil keputusan menyetujui permohonan pinjaman, koperasi menyerahkan blanko (formulir) perjanjian pinjaman kepada anggota koperasi. Dalam blanko tersebut, pihak koperasi telah menyusun isi perjanjiannya, anggota diminta untuk memberikan pendapatnya apakah ia menyetujui atau tidak. Dalam praktek, perjanjian pinjaman dibuat dengan bentuk dan format yang sudah ditentukan oleh koperasi.

Pihak koperasi sebagai kreditur yang mengatur atau menentukan isi perjanjian karena kreditur mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan dengan debitur. Di samping itu, ada alasan-alasan lain seperti menghemat waktu,

⁵ R. Subekti, 2002, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, hal. 17.

⁶ Wibowo Turandy, 2014, *Asas-asas Perjanjian (online)*, dalam <http://www.jurnalhukum.com/asas-asas-perjanjian> diunduh Minggu, 19 Januari 2014, pukul 21:30 WIB.

praktis dan untuk memberikan pelayanan yang baik kepada debitur. Hal ini didukung dengan pemberian kredit kepada anggotanya dimana koperasi telah mengambil keputusan menyetujui permohonan pinjaman.

Penelitian ini mendasarkan pada penelitian hukum yang dilakukan dengan pendekatan doktrinal, yaitu penemuan hukum *in-concreto*⁷. Alasannya, karena dalam penelitian ini hukum dikonsepkan, sebagai norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau oleh pejabat negara yang berwenang.

Tujuan penelitian dengan pendekatan normatif ini adalah untuk mengetahui apakah yang menjadi norma hukumnya dari suatu peristiwa konkrit tertentu. Artinya untuk menguji sesuai tidaknya peristiwa konkrit yang diteliti dengan norma/yurisprudensi/doktrin yang ada.⁸

Metode studi kepustakaan ini dipergunakan untuk mengumpulkan data sekunder, yang dilakukan dengan cara, mencari, menginventarisasi dan mempelajari peraturan perundang-undangan, doktrin-doktrin, dan data-data sekunder yang lain, yang terkait dengan objek yang dikaji. Adapun instrumen pengumpulan yang digunakan berupa form dokumentasi, yaitu suatu alat pengumpulan data sekunder, yang berbentuk format-format khusus, yang dibuat untuk menampung segala macam data, yang diperoleh selama kajian dilakukan.

Para pihak yang diwawancarai dalam penelitian ini, antara lain: (1) Pimpinan atau karyawan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Artha Jaya Makmur Surakarta. (2) Nasabah simpan pinjam di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Artha Jaya Makmur Surakarta.

⁷ Bambang Waluyo, 1996, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 81.

⁸ Khudzaifah Dimiyati dan Kelik Wardono, 2008, *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta: UMS, hal. 23.

Data yang telah terkumpul dan telah diolah akan dibahas dengan menggunakan metode normatif kualitatif, yakni suatu pembahasan yang dilakukan dengan cara menafsirkan dan mendiskusikan data-data yang telah diperoleh dan diolah, berdasarkan (dengan) norma-norma hukum, doktrin-doktrin hukum dan teori ilmu hukum yang ada.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak dalam Perjanjian Pinjam Meminjam pada KSP Artha Jaya Makmur Surakarta

Sesuai data yang diperoleh, analisis asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian pinjaman di KSP Artha Jaya Makmur Surakarta terdiri dari lima unsur, yaitu:

Kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian

Unsur kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian dalam kebebasan membuat perjanjian, baik bagi konsumen (calon nasabah) dan bagi pelaku usaha (koperasi) sudah terpenuhi. Terpenuhinya unsur tersebut karena koperasi menerapkan peraturan bahwa setiap konsumen yang akan meminjam ada ikatan perjanjian pinjaman dan perjanjian tersebut disetujui oleh konsumen. Apabila konsumen tidak mau terikat dalam perjanjian, maka konsumen bebas untuk untuk tidak meminjam.

Kebebasan untuk memilih dengan siapa akan membuat perjanjian

Unsur kebebasan untuk memilih dengan siapa akan membuat perjanjian. Bagi pihak koperasi unsur tersebut sudah terpenuhi, tetapi bagi konsumen unsur belum terpenuhi. Alasan belum terpenuhinya, karena pihak koperasi dapat

memilih konsumen sesuai dengan terpenuhinya syarat-syarat yang diperlukan dan dianggap mampu mengembalikan pinjaman. Sementara konsumen hanya dapat menyetujui keinginan koperasi.

Kebebasan untuk menentukan bentuk suatu perjanjian

Unsur kebebasan untuk menentukan bentuk suatu perjanjian bagi pihak koperasi unsure tersebut sudah terpenuhi. Sementara bagi konsumen unsur belum terpenuhi. Alasan belum terpenuhinya unsur kebebasan untuk memilih dengan siapa akan membuat perjanjian, karena KSP Artha Jaya Makmur Surakarta menggunakan bentuk perjanjian baku dimana perjanjian yang di dalam pembuatannya hanya ditentukan oleh satu pihak saja, isi perjanjian telah dirancang oleh pihak KSP Artha Jaya Makmur, sementara pihak debitur tidak diikutserakan dalam menentukan bentuk perjanjian.

Kebebasan untuk menerima atau menyimpangi ketentuan Undang-Undang yang bersifat opsional (menetapkan isi perjanjian)

Kebebasan untuk menerima atau menyimpangi ketentuan Undang-Undang yang bersifat opsional (menetapkan isi perjanjian) bagi koperasi unsur sudah terpenuhi. Tetapi bagi konsumen hanya sebagian unsur yang terpenuhi, karena konsumen hanya boleh menawar dalam hal bunga pinjaman selebihnya debitur tetap mentaati isi yang dibuat oleh KSP Artha Jaya Makmur Surakarta.

Kebebasan untuk menetapkan cara membuat perjanjian

Unsur kebebasan untuk menetapkan cara membuat perjanjian sudah terpenuhi hanya bagi koperasi. Sedangkan bagi konsumen belum terpenuhi. Alasannya pihak koperasi sudah menetapkan cara membuat perjanjian dan

konsumen tunduk pada segala petunjuk dan peraturan KSP Artha Jaya Makmur Surakarta.

Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak yang Terlibat dengan Perjanjian Pinjam Meminjam pada KSP Artha Jaya Makmur Surakarta

Perjanjian pinjaman di KSP Artha Jaya Makmur Surakarta ada tiga unsur asas kebebasan berkontrak tidak terpenuhi dan dua unsur terpenuhi

Unsur yang tidak terpenuhi adalah :

Kebebasan untuk memilih dengan siapa akan membuat perjanjian

Unsur kebebasan untuk memilih dengan siapa akan membuat perjanjian untuk konsumen tidak memperoleh perlindungan. Karena konsumen dalam perjanjian pinjaman sudah ditetapkan sebagai pihak pertama dan koperasi sebagai pihak kedua.

Kebebasan untuk menetapkan bentuk perjanjian

Kebebasan untuk menetapkan bentuk perjanjian antara konsumen dengan koperasi tidak seimbang. Bentuk perjanjian sudah ditetapkan oleh pihak koperasi, sehingga koperasi mempunyai kedudukan lebih tinggi dari konsumen. Dengan demikian pihak konsumen tidak memperoleh perlindungan dalam unsur menetapkan bentuk perjanjian.

Kebebasan untuk menetapkan cara membuat perjanjian

Konsumen atau calon nasabah dengan koperasi tidak memiliki kedudukan seimbang dalam unsur kebebasan untuk menetapkan cara membuat perjanjian. Konsumen tidak dilibatkan dalam pembuatan perjanjian, pihak koperasi yang berhak membuat perjanjian, sehingga kebebasan untuk menetapkan cara membuat perjanjian pada konsumen tidak memperoleh perlindungan.

Dua unsur yang terpenuhi adalah :

Kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian

Asas kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian antara konsumen dengan koperasi mempunyai kedudukan seimbang. Kedudukan yang seimbang membuat konsumen dan koperasi sama-sama memperoleh perlindungan hukum.

Kebebasan untuk menerima atau menyimpangi ketentuan Undang-Undang yang bersifat opsional (menetapkan isi perjanjian)

Unsur kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian di KSP Artha Jaya Makmur Surakarta terpenuhi. Antara konsumen dengan koperasi mempunyai kedudukan seimbang dalam hak dan kewajiban, sehingga antara konsumen dan koperasi sama-sama memperoleh perlindungan hukum.

SIMPULAN

Dalam perjanjian pinjaman meminjam pada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Artha Jaya Makmur Surakarta

Unsur-unsur : (a) Kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian dan (b) Kebebasan untuk menerima atau menyimpangi ketentuan Undang-Undang yang bersifat opsional (menetapkan isi perjanjian sudah terpenuhi. Hal ini sesuai dengan Pasal 1337 dan pendapat R. Subekti dan R. Tjitrosudibio

Unsur-unsur : (c) Kebebasan untuk memilih dengan siapa akan membuat perjanjian, (d) Kebebasan untuk memilih dengan siapa akan membuat perjanjian, dan (e) Kebebasan untuk menentukan bentuk suatu perjanjian tidak terpenuhi. Hal

ini sesuai dengan Pasal 1320 dan Pasal 1338 ayat (1) KUHPdata berdasarkan pada pendapat Remy Syahdeini

Perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat dengan perjanjian pinjaman meminjam pada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Artha Jaya Makmur Surakarta, dilihat dari aspek asas kebebasan berkontrak

Terdapat perlindungan dalam hal: a) Kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian dan (b) Kebebasan untuk menerima atau menyimpangi ketentuan Undang-Undang yang bersifat opsional (menetapkan isi perjanjian sudah terpenuhi). Hal ini sesuai dengan Pasal 1320 dan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta pendapat Remy Syahdeini.

Tidak terdapat perlindungan dalam hal: (c) Kebebasan untuk memilih dengan siapa akan membuat perjanjian, (d) Kebebasan untuk memilih dengan siapa akan membuat perjanjian, dan (e) Kebebasan untuk menentukan bentuk suatu perjanjian. Hal ini sesuai dengan Pasal 1338 KUHPdata dan Pasal 18 Ayat (1) Huruf g dan huruf h dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta pendapat Subekti.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut :

Bagi pemerintah hendaknya menyiapkan sebuah perangkat hukum berupa Undang-Undang yang mengatur lebih khusus mengenai penggunaan perjanjian baku dalam perjanjian pinjaman di KSP Artha Jaya Makmur Surakarta guna

menghindari terjadinya penyalahgunaan keadaan oleh salah satu pihak yang berada dalam kedudukan lebih tinggi.

Untuk mengurangi risiko yang dihadapi dalam perjanjian pinjaman di koperasi, maka peran aktif pemerintah sangatlah diperlukan oleh nasabah dengan cara memperketat pengawasan dalam hal penggunaan perjanjian baku. Hal ini bertujuan agar nasabah di koperasisebagai pihak yang lebih lemah kedudukannya lebih dapat terlindungi hak-haknya.

KSP Artha Jaya Makmur Surakarta selaku pihak kreditur haruslah mempunyai itikad baik dan tidak membuat dan memuat klausul baku yang merugikan pihak nasabah debitur, serta wajib memberikan informasi maupun penjelasan yang benar, detail, transparan, dan jelas mengenai klausul-klausul maupun syarat-syarat yang harus dipenuhi debitur dalam perjanjian pinjaman di KSP Artha Jaya Makmur Surakarta.

Dalam melakukan perjanjian kredit dengan menggunakan perjanjian bakudimana banyak debitur merasa terpaksa menyetujui isi perjanjiannya, disarankan bagi KSP Artha Jaya Makmur Surakarta perlu memperhatikan tanggapan atau pendapat debitur,sehingga asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian tidakdikesampingkan.

Sebaiknya asas kebebasan berkontrak tetap perlu digunakan dalammenentukan perjanjian kredit, karena asas ini mempunyai tujuan untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan yang serasi, selaras, dan seimbang demi kepentingan debitur.

Bagi anggota KSP Artha Jaya Makmur Surakarta yang meminjam di koperasi harus lebih aktif dalam memperjuangkan hak-haknya serta lebih kritis dalam mencermati klausul-klausul yang ada dalam perjanjian pinjaman di KSP Artha Jaya Makmur Surakarta. Terdapatnya klausul-klausul yang tidak dapat dipahami atau kurang jelas, maka anggota yang meminjam di KSP Artha Jaya Makmur Surakarta harus mempertanyakan klausula tersebut guna mendapatkan pengertian yang rinci agar dapat memutuskan kehendaknya secara rasional.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Dimiyati, Khudzaifah dan Wardono Kelik, 2008, *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta: UMS.
- Firdaus, Muhammad dan Susanto, Agus Edhi, 2002, *Perkoperasian, Sejarah, Teori, dan Praktek*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Miru, Ahmadi, 2007, *Hukum Kontrak (Perancangan Kontrak)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Rahman, Hasanudin, 1998, *Aspek-aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Remy, Sjahdeini Sutan, 1993, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia (Buku I)*. Jakarta: Institut Bankir Indonesia.
- Subekti, R., 2002, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa.
- Waluyo, Bambang, 1996, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika.

Jurnal:

- Turandy, Wibowo, 2014, *Asas-asas Perjanjian (online)*, dalam <http://www.jurnalhukum.com/asas-asas-perjanjian> diunduh Minggu, 19 Januari 2014, pukul 21:30 WIB.

Undang-Undang:

- Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Koperasi.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian.
- Pasal 1 ayat (1 dan 2) Kepmen Nomor: 96/Kep/M.KUKM/IX/2004 Tentang Pedoman Standar Operasional Manajemen Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi.